

ANALISIS PENGARUH PENGELOUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA DAN PENGELOUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN MIMIKA

Abu Bakar

Program Studi Ekonomi Pembangunan STIE Jambatan Bulan
email: abubakarqueen@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the significance of the effect of household consumption expenditure and government spending partially on the Mimika Regency Human Development Index, and to test and analyze the significance of the effect of household consumption expenditure and government expenditure simultaneously on the Mimika Regency Human Development Index. The data used in this research is secondary data obtained from BPS Mimika Regency and the Regional Finance and Asset Division of Mimika Regency through documentation techniques. To analyze the data, a semi log multiple regression analysis was used. The results showed that: (a) Household Consumption Expenditure, which is proxied from expenditure for food and non-food consumption, has a significant effect on the Mimika Regency Human Development Index; (b) Government spending, which is proxied from spending on education and health, does not have a significant effect on the Mimika Regency Human Development Index; and (c) Household Consumption Expenditures and Government Expenditures simultaneously have a significant effect on the Mimika Regency Human Development Index.

Keywords: Human Development Index, Household Consumption Expenditures, Government Expenditures

PENDAHULUAN

Tujuan akhir suatu pembangunan ekonomi daerah yaitu kesejahteraan rakyat, karena manusia bukan hanya merupakan obyek pembangunan tetapi diharapkan bisa menjadi subyek, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan daerah yang secara

makro menjadi kemajuan suatu negara. Kesejahteraan rakyat salah satunya dapat diukur melalui peningkatan kualitas pembangunan manusianya.

Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai macam

ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau negara. Namun demikian, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan suatu ukuran standar yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*.

IPM terdiri dari dimensi pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Tiga aspek ini merupakan hal yang paling mempengaruhi IPM. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik serta memperoleh pendapatan sehingga masyarakat mudah mengakses kesehatan. Kesehatan masyarakat yang rendah menyebabkan produktivitas rendah, produktivitas rendah akan menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat. Pendapatan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan karena keterbatasan biaya. Jika hal ini terjadi maka akan berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan manusia (Ndakularak, Setiawina, dan Djayastra, 2014). Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus mampu menaikkan tiga dimensi ini. Untuk itu diperlukan upaya-upaya masif dari seluruh pihak agar mampu merelisasikan tujuan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah tersebut.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi melalui kebijakan fiskalnya. Kebijakan fiskal (*fiscal policy*) merupakan tindakan-tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya dan penentuan harga barang dan jasa dari perusahaan. Besarnya peran pemerintah terhadap pembangunan suatu negara/daerah dapat dilihat dari seberapa besar alokasi anggaran pemerintah (*public*) yang dikeluarkan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Semakin besar alokasi anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk meningkatkan komponen-komponen pembangunan manusia, maka akan semakin meningkat pula pembangunan manusia pada suatu negara/daerah. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa besarnya alokasi pengeluaran pemerintah mempunyai keterkaitan terhadap peningkatan IPM suatu negara/daerah. Diantara instrumen kebijakan fiskal tersebut adalah pengalokasian anggaran belanja yang berkaitan dengan fasilitas publik seperti pendidikan dan kesehatan (Lilik, 2008).

Selain oleh pemerintah, besarnya perubahan IPM juga ditentukan oleh peran masyarakat. Peran masyarakat dalam

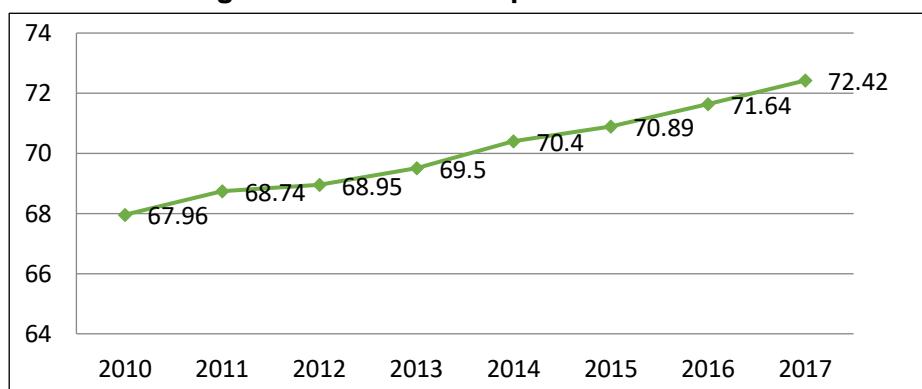
meningkatkan nilai IPM yakni dengan meningkatkan daya belinya (konsumsi). Jika pengeluaran konsumsi masyarakat meningkat, maka nilai IPM juga akan dapat meningkat.

Kabupaten Mimika di Provinsi Papua lahir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 sebagai Kabupaten Administratif, yang kemudian berdasarkan Undang-Undang

Nomor 45 Tahun 1999 menjadi Kabupaten Otonom. Dengan kekayaan alam berupa tambang emas terbesar di dunia, seharusnya hasil pengelolaan kegiatan ekonomi di Kabupaten Mimika mampu memberikan sumbang nilai tambah yang besar bagi perekonomian Kabupaten Mimika dan peningkatan ke sejahteraan masyarakat yang dinilai dari angka IPM nya.

Gambar 1.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika Tahun 2010-2017



Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2018.

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa perkembangan IPM Kabupaten Mimika dalam kurun waktu tahun 2010-2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan yang terjadi bervariasi, dan perubahan kenaikan angka IPM tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni mengalami perubahan sebesar 0,9 satuan dibanding tahun sebelumnya, sementara yang terkecil adalah tahun 2012 yang hanya mengalami perubahan sebesar 0,21 satuan dibanding tahun sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika, serta untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan Manusia

“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana. Tetapi hal ini seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang”. (Human Development Report dalam BPS, 2014: 7).

Kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) edisi pertama yang dipublikasikan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 secara jelas menekankan arti pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, dan bukan sebagai alat pembangunan. Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan. Hal ini harus terjadi pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, fokus utama pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya (BPS, 2014: 7).

Mengutip isi HDR pertama tahun 1990 (BPS, 2014: 8),

pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian dan pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan (*capability*) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal. Pembangunan manusia menjadi dasar penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Dengan demikian pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor

sosial tetapi merupakan pendekatan komprehensif dari semua sektor (Kacaribu, 2013: 11).

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah. Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. IPM merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup layak.

Sejak pertama kali diperkenalkan oleh UNDP, IPM terus mendapat banyak sorotan. Banyak dukungan yang mengalir, tetapi tidak sedikit kritikan terhadap indikator ini. Tercatat bahwa UNDP melakukan beberapa kali penyempurnaan pada tahun 1991 dan 1995 dan perubahan di tahun 2010. Indonesia juga turut ambil bagian dalam mengaplikasikan penghitungan metode baru. Dengan melihat secara mendalam tentang kelemahan pada penghitungan metode lama, Indonesia merasa perlu memperbarui penghitungan untuk menjawab tantangan masyarakat internasional. Pada tahun 2014,

Indonesia secara resmi melakukan penghitungan IPM dengan metode baru. Untuk mengaplikasikan metode baru, sumber data yang tersedia di Indonesia antara lain (BPS, 2014: 20):

- a. Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010/SP2010, Proyeksi Penduduk)
- b. Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional/SUSENAS).
- c. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran perkapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Indonesia melakukan beberapa penyesuaian terhadap metode baru. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita karena masalah ketersediaan data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan pengeluaran per kapita.

Indikator angka harapan hidup saat lahir tidak mengalami perubahan pada metode baru. Akan tetapi, sumber data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini telah diperbarui dengan menggunakan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010). Indikator ini menjadi indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu

masyarakat. Indikator ini tetap dipertahankan keberadaannya karena selain relevansinya, juga ketersediaan hingga tingkat kabupaten/kota cukup memadai.

Indikator angka melek huruf diganti dengan indikator baru yang disebut harapan lama sekolah. Seperti pada penjelasan sebelumnya, indikator angka melek huruf sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini sehingga diganti dengan harapan lama sekolah. Indikator rata-rata lama sekolah tetap dipertahankan karena menggambarkan stok yang terjadi pada dunia pendidikan. Namun, cakupan penghitungan yang digunakan pada metode baru telah diganti. Pada metode lama, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Sementara pada metode baru, cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas sesuai dengan rekomendasi UNDP. Selain untuk keterbandingan dengan internasional, alasan penting lain yaitu bahwa pada umumnya penduduk berusia 25 ke atas tidak bersekolah lagi. Walaupun sebagian kecil ada yang masih bersekolah, jumlahnya tidak signifikan. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Indikator pengeluaran per kapita juga tetap dipertahankan keberadaannya karena cukup operasional dari sisi ketersedian data. Pada dasarnya, indikator

PNB per kapita lebih menggambarkan kesejahteraan masyarakat dibanding pengeluaran per kapita. Namun data ini tidak tersedia hingga tingkat kabupaten/kota. Meski pengeluaran per kapita tetap digunakan, ada perubahan pada penghitungan paritas daya beli (*purcashing power parity*) yang digunakan. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam penghitungan paritas daya beli. Sementara pada metode baru terdapat 96 komoditas yang digunakan. Hal ini dilakukan karena selama 1990 hingga 2014 telah terjadi banyak perubahan pola konsumsi masyarakat sehingga komoditas penghitungan paritas daya beli juga harus diperbarui (BPS, 2014: 22).

Pada metode lama, agregasi indeks komposit menggunakan rata-rata aritmatik. Sementara pada metode baru menggunakan rata-rata geometrik. Metode agregasi indeks komposit yang digunakan pada metode baru merupakan penyempurnaan metode lama. Seperti pada penjelasan sebelumnya, rata-rata geometrik memiliki keunggulan dalam mendeteksi ketimpangan dibanding rata-rata aritmatik.

Kecepatan perubahan IPM juga menjadi salah satu fokus dalam pembangunan manusia. Pada metode lama, kecepatan perubahan IPM diukur dengan menggunakan reduksi *shortfall*. Pada metode baru, kecepatan perubahan IPM diukur dengan

meng-gunakan pertumbuhan aritmatik.

Pengeluaran Konsusmi Rumah Tangga

Menurut Sukirno (Utami, 2017), pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam periode waktu tertentu. Tidak semua transaksi yang dilakukan oleh rumah tangga digolongkan sebagai konsumsi (rumah tangga). Kegiatan rumah tangga untuk membeli rumah digolongkan investasi. Seterusnya sebagai pengeluaran mereka, seperti membayar asuransi dan mengirim uang kepada orang tua (atau anak yang sedang bersekolah) tidak digolongkan sebagai konsumsi karena ia tidak merupakan pembelanjaan terhadap barang atau jasa yang dihasilkan dalam perekonomian (Alfian D, 2016: 13).

Menurut BPS (2017: 13), pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

Pengeluaran Pemerintah

Menurut Usmaliadanti (2011) Pengeluaran pemerintah adalah nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk mengembangkan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Pembelian pemerintah atas barang dan jasa dapat digolongkan menjadi dua golongan utama yaitu pengeluaran penggunaan pemerintah atas konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah. Konsumsi pemerintah adalah pembelian barang dan jasa yang akan dikonsumsikan seperti membayar gaji, membeli alat-alat kantor untuk digunakan dan membeli bensin untuk kendaraan operasional pemerintah. Investasi pemerintah meliputi pengeluaran untuk membangun prasarana seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan irigasi, memberikan subsidi, beasiswa bantuan untuk korban bencana alam tidak digolongkan sebagai pengeluaran pemerintah atas produk nasional karena pengeluaran tersebut untuk membeli barang dan jasa.

Hubungan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya (Sukirno, 2003:338). Semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin besar pulapengeluaran konsumsi. Perbandingan besarnya penge-luaran konsumsiterhadap tambahan pendapatan adalah hasratmarjinal untuk berkonsumsi (*Marginal Propensity to Consume/MPC*). Sedangkan besarnya tambahan pendapatan dinamakan hasratmarjinal untuk menabung (*Marginal to Save/MPS*). Pada pengeluaran konsumsi rumah tangga terdapat konsumsi minimum yang dirumah tangga tersebut, yakni besarnya pengeluaran konsumsi yang harus dilakukan, walaupun tidak ada pendapatan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ini disebut pengeluaran konsumsi tonom (*autonomous consumption*).

Jadi jelaslah bahwa pengeluaran merupakan kegiatan yang besarnya dipengaruhi oleh pendapatan. Pendapatan yang tinggi akan berimbas pada pengeluaran yang tinggi pula. Bila pendapatan menurun, maka rumah tangga juga memiliki kecenderungan akan menurunkan konsumsi. Maka bila diruntut lebih jauh, kenaikan pengeluaran riil mengindikasikan kenaikan pen-

dapatan, sedangkan kenaikan pendapatan riil mengindikasikan kenaikan kesejahteraan. Kenaikan pendapatan ini akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena pendapatan merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sejalan dengan hal tersebut, Kusumawardani (2018: 10) menjelaskan bahwa tindakan konsumsi dilakukan setiap hari oleh siapapun, tujuannya adalah memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhi berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun sekunder, barang mewah maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Tingkat konsumsi memberikan gambaran tingkat kemakmuran seseorang atau masyarakat. Adapun pengertian kemakmuran disini adalah semakin tinggi tingkat konsumsi seseorang maka semakin makmur, sebaliknya semakin rendah tingkat konsumsi seseorang berarti semakin miskin.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Sesuai dengan teori Keynes (Mankiw, 2006: 444) bahwa semakin tinggi pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa, maka makin tinggi pendapatan dan kesejahteraan keluarga tersebut.

Tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dapat pula dikatakan membaik apabila proporsi pen-dapat yang digunakan untuk mengkonsumsi non makanan. Pergeseran pola pengeluaran untuk konsumsi dari makanan ke non makanan dapat dijadikan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan anggapan bahwa setelah kebutuhan makanan telah terpenuhi, kelebihan pendapatan akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi bukan makanan antara lain untuk tabungan atau investasi.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah Dengan Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Gupta et. al (1998) dalam Prasetyo dan Zuhdi (2013:615), pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan dan pendidikan dapat membawa efek yang positif bagi *human capital*, yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi saat pemerataan menjadi salah satu topik utama dan dapat menurunkan kemiskinan. Modal manusia yang berpendidikan dan sehat adalah faktor yang signifikan dari keunggulan pembentukan negara yang kompetitif. Hal itu mempengaruhi efisiensi tenaga kerja dan produktivitas, yang pada gilirannya menarik investasi asing ke negara. Kesehatan dan pendidikan yang lebih baik akan menarik uang ke dalam perekonomian suatu negara.

Tenaga kerja yang terdidik dan sehat sering menjadi pengaruh fundamental untuk investor asing ketika membuat sebuah keputusan tentang investasi modal (Malik dalam Lonska & Boronenka, 2015:1031).

RANCANGAN PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiatif, yaitu metode penelitian yang bermaksud mengukur pengaruh satu atau beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Penggunaan metode penelitian asosiatif dalam penelitian ini karena penulis bermaksud mengukur signifikansi pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika.

Daerah dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data atau informasi

mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan penelitian, yakni dengan melihat kembali laporan-laporan tertulis, baik berupa angka maupun keterangan yang tersedia pada berbagai institusi. Selain data-data laporan tertulis, untuk kepentingan penelitian ini juga digali berbagai data, informasi dan referensi dari berbagai sumber pustaka, media massa dan internet.

Metode Analisis Data

Untuk mengukur signifikansi pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika, digunakan analisis regresi berganda semi log yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 \ln X_1 + b_2 \ln X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Indeks Pembangunan Manusia

X_1 = Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

X_2 = Pengeluaran Pemerintah

a = Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien regresi

e = Error term atau galat.

Mengingat instrumen analisis menggunakan analisis regresi berganda, maka terhadap data perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk memperoleh hasil estimasi regresi yang memenuhi persyaratan BLUE (*Best Linier*

Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik yang digunakan antara lain uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas Data

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Adapun metode yang digunakan adalah Metode Statistik One Sample Kolmogorov-Smirnov. Pengambilan keputusan normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov adalah jika nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov $> \alpha$ maka residual dalam model terdistribusi secara normal, dan sebaliknya jika nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov $< \alpha$ maka residual dalam model tidak terdistribusi secara normal.

Dengan menggunakan taraf signifikansi (α) 5% dan $n = 8$, diperoleh hasil output uji normalitas dengan bantuan SPSS sebagai berikut:

Tabel 1.
Hasil Ouput Uji Normalitas Dengan Bantuan SPSS

Kolmogorov-Smirnov ^a		
Statistic	N	Sign.
0,627	8	0,826

Sumber: Hasil Output SPSS, 2019.

Dari hasil output SPSS di atas, terlihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov statistic sebesar 0,627 dengan signifikansi = 0,826. Sesuaiketentuan uji normalitas data menggunakan Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari nilai alpha ($0,826 > 0,05$), maka nilai residual dalam model adalah terdistribusi secara normal.

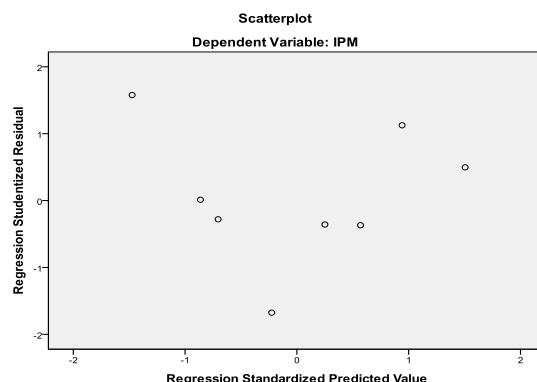
b. Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah homoskedastisitas atau dengan kata lain model harus bersifat BLUE (*Best Linear*

Unbiased Estimate). Kondisi ini tercapai jika semua residual atau *error* memiliki varian yang sama. Apabila varian *error* tidak konstan atau berubah-ubah, maka hal ini disebut heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode grafik, yakni dengan melihat grafik *scatterplot* dari nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan resi-dualnya (SRESID). Model dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Berikut disajikan scatterplot pengujian heteroskedastisitas.

Gambar 2.

Hasil Ouput Uji Heteroskedastisitas Dengan Bantuan SPSS



Sumber: Hasil Output SPSS, 2018.

Dari scatterplot resi-dual di atas, terlihat residual tidak membentuk pola atau ragam konstan, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

c. Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya hubungan

linier atau korelasi yang tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari masalah multikolinearitas. Model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan nilai *VIF* kurang dari 10.

Berikut disajikan hasil pengujian multikolinearitas dengan menggunakan bantuan SPSS.

Tabel 2.
Hasil Ouput Uji Multikolinearitas Dengan Bantuan SPSS
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,388	2,576
Pengeluaran Pemerintah	0,388	2,576

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Hasil Output SPSS, 2019.

Dari hasil pengujian multikolinearitas di atas, terlihat bahwa nilai *Tolerance* kedua variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai *VIF* kurang dari 10. Sesuai dengan ketentuan pengujian multikolinearitas dengan menggunakan *Tolerance* dan *VIF* maka dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

d. Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, dapat digunakan uji Durbin-Watson. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan uji ini

adalah jika nilai Durbin-Watson (d) terletak antara batas atas atau *upper bound* (d_U) dan $4-d_U$, atau secara matematis dapat dituliskan $d_U < d < 4-d_U$ maka artinya tidak terdapat autokorelasi. Jika nilai

Durbin-Watson (d) terletak antara *upper bound* (d_U) dan *lower bound* (d_L) atau terletak antara $(4-d_U)$ dan $(4-d_L)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

Tabel 3.
Hasil Output Uji Autokorelasi Dengan Bantuan SPSS
Model Summary^b

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.13965	1.318

- a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
b. Dependent Variable: IPM
Sumber: Hasil Output SPSS, 2019

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai Durbin-Watson adalah 1,318, sedangkan nilai *upper bound* (d_U) dengan jumlah variabel sebanyak 3 dan banyaknya data adalah 8 pada taraf signifikansi 5% sebesar 2,287 dan *lower bound* (d_L) adalah 0,367, maka tampak bahwa nilai Durbin-Watson (d) terletak antara *upper bound* (d_U) dan *lower bound* (d_L), atau secara matematis dapat dituliskan $d_L < d < d_U$ maka artinya gejala autokorelasi tidak dapat disimpulkan.

Interpretasi Model Regresi

Untuk mengukur pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (X_1) dan Pengeluaran Pemerintah (X_2) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y) Kabupaten Mimika tahun 2010-2017, digunakan analisis regresi berganda semi log. Adapun bentuk persamaan regresinya adalah :

$$Y = b_0 + b_1 \ln X_1 + b_2 \ln X_2 + e$$

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS, hasil output dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 4.
Hasil Output Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-239.636	12.930		-18.533	.000
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10.872	.548	1.092	19.838	.000
Pengeluaran Pemerintah	-.401	.176	-.126	-2.282	.071

- a. Dependent Variable: IPM

Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukan pada tabel di atas, maka dapat disusun persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = -239,636 + 10,872X_1 - 0,401X_2$$

Model persamaan ter-sebut bermakna:

- Nilai konstanta sebesar - 239,636 artinya besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mimika mengalami penurunan sebesar 239,636 persen jika tidak dipengaruhi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah, dengan asumsi variabel lain adalah konstan (*ceteris paribus*).
- Variabel Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh positif terhadap IPM Kabupaten Mimika. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 10,872, yang artinya setiap penambahan 1 persen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga akan meningkatkan IPM sebesar 10,872 persen.
- Variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif terhadap IPM Kabupaten Mimika. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien Pengeluaran Pemerintah sebesar -0,041, yang artinya setiap peningkatan Pengeluaran Pemerintah sebesar 1 persen akan menurunkan nilai IPM sebesar 0,041 persen.

Uji Statsistik

a. Uji F (Uji Simultan)

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen dalam model regresi dapat dilakukan dengan uji F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis statistik uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM Kabupaten Mimika.

H_a : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat IPM Kabupaten Mimika.

Kriteria pengujian uji F adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima, artinya bahwa secara simultan variabel Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap IPM Kabupaten Mimika, sebaliknya jika $F_{hitung} <$ dari F_{tabel} maka H_0 diterima, artinya bahwa secara simultan variabel secara simultan variabel Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah tidak

ber-pengaruh signifikan ter-hadap IPM Kabupaten Mimika.

Dengan menggunakan ketentuan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$), dk pembilang = 2 dan dk penyebut = 5, diperoleh $F_{tabel} = 5,79$, Sedangkan untuk nilai F_{hitung} sebesar 422,306 dengan tingkat probabilitas 0,000 (signifikan). Dengan demikian tampak bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($422,306 > 5,79$) dan probabilitas $< 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap IPM Kabupaten Mimika.

b. Uji t (Uji Parsial)

Uji signifikansi parsial (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi pe-nagaruh variabel inde-penden secara individu (parsial) terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel independen dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen jika nilai $t_{hitung} >$ nilai t_{tabel} .

1) Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap IPM Kabupaten Mimika

Signifikansi pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap IPM Kabupaten Mimika tahun 2010-2017 diukur dengan menggunakan taraf signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan (*degree of freedom*) pada pengujian satu sisi

adalah $n-k = 8-3 = 5$, maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,02. Adapun hipotesa statistik pengujiannya adalah:

H_0 : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM Kabupaten Mimika.

H_a : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh signifikan terhadap IPM Kabupaten Mimika.

Dari hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai t_{hitung} variabel Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 19,838. Berdasarkan hasil analisis dan ketentuan di atas, maka diketahui nilai t_{hitung} variabel Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 19,838 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2,02 ($19,838 > 2,02$), sehingga dapat di-simpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh signifikan terhadap IPM Kabupaten Mimika.

2) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap IPM Kabupaten Mimika

Signifikansi pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap IPM Kabupaten Mimika tahun 2010-2017 diukur dengan menggunakan taraf signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan (*degree of freedom*) pada pengujian satu sisi adalah $n-k = 8-3 = 5$, maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,02.

Adapun hipotesa statistik pengujinya adalah:

H_0 : Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM Kabupaten Mimika.

H_a : Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap IPM Kabupaten Mimika.

Dari hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai t_{hitung} variabel Pengeluaran Pemerintah sebesar -2,282. Berdasarkan hasil analisis dan ketentuan di atas, maka diketahui nilai t_{hitung} variabel Pengeluaran Pemerintah sebesar -2,282 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 2,02 (-2,282 < 2,02), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM Kabupaten Mimika.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan secara komprehensif terhadap variabel dependen, Nilai R^2 (Koefisien Determinasi) mempunyai *range* antara 0-1, Semakin besar R^2 mengindikasikan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Hasil dari analisis regresi dengan bantuan SPSS, diperoleh R^2 (Koefisien Determinasi) sebesar 0,994, yang artinya variabel dependen dalam model IPM Kabupaten Mimika dijelaskan oleh variabel independen yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah sebesar 99,4%, sedangkan sisanya sebesar 0,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Tabel 5.

Koefisien Determinasi Dengan Bantuan SPSS
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.997 ^a	.994	.992	.13965

a. Predictors: (Constant), Pengeluaran Pemerintah, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

b. Dependent Variable: IPM

Sumber: Hasil Output SPSS, 2019

Pembahasan

Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika

Berdasarkan hasil analisis dengan uji t, diketahui bahwa variabel Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Kabupaten Mimika. Adanya

pengaruh positif dan signifikan ini dikarenakan peningkatan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, diikuti pula dengan peningkatan IPM Kabupaten Mimika.

Menurut Sukirno (2003:338), konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin besar pulapengeluaran konsumsi. Jadi jelaslah bahwa pengeluaran konsumsi merupakan kegiatan yang besarnya dipengaruhi oleh pendapatan. Pendapatan yang tinggi akan berimbas pada pengeluaran yang tinggi pula. Bila pendapatan menurun, maka rumah tangga juga memiliki kecenderungan akan menurunkan konsumsi. Maka bila diruntut lebih jauh, kenaikan pengeluaran riil mengindikasikan kenaikan pendapatan, sedangkan kenaikan pendapatan riil mengindikasikan kenaikan kesejahteraan. Kenaikan pendapatan ini akan meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena pendapatan merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Besarnya pendapatan nasional masyarakat suatu daerah dapat dilihat berdasarkan nilai PDRB nya. PDRB menggambarkan tingkat produksi daerah yang dapat dicapai pada satu tahun tertentu. Berdasarkan data PDRB tersebut, laju pertumbuhan sektor ekonomi

menunjukkan besarnya perubahan nilai produksi yang dihasilkan dalam satu tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan yang positif menunjukkan produksi sektor tersebut mengalami kenaikan, dan sebaliknya laju pertumbuhan yang negatif menunjukkan produksi sektor tersebut mengalami penurunan. Dengan memperhatikan angka laju pertumbuhan sektor, dapat dijadikan suatu rujukan apakah pendapatan masyarakat pada sektor tersebut mengalami kenaikan atau penurunan. Berdasarkan publikasi BPS Kabupaten Mimika, laju pertumbuhan sektor ekonomi yang terus menunjukkan trend meningkat sepanjang tahun 2014-2017 di Kabupaten Mimika adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor industri pengolahan. Sementara itu, sektor-sektor yang lain di Kabupaten Mimika sepanjang 2014-2017 mengalami trend pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2014, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki laju pertumbuhan sebesar -0,5 persen, kemudian meng-alami peningkatan menjadi 5,1 persen (2015), 13,1 persen (2016), dan 16,4 persen (2017). Untuk sektor industri pengolahan, pada tahun 2014 memiliki laju pertumbuhan sebesar 4 persen, kemudian meningkat menjadi 6,4 persen (2015), 7,7

persen (2016), dan 8 persen (2017). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan penge-luaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Mimika bersumber dari peningkatan pendapatan masyarakat pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor industri pengolahan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah. Sesuai dengan teori Keynes (Mankiw, 2006: 444) bahwa semakin tinggi pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa, maka makin tinggi pendapatan dan kesejahteraan keluarga tersebut. Senada dengan pendapat Keynes, menurut Kusumawardani (2018: 10), tingkat konsumsi mem-berikan gambaran tingkat kemakmuran seseorang atau masyarakat. Adapun pengertian kemakmuran disini adalah semakin tinggi tingkat konsumsi seseorang maka semakin makmur, sebaliknya semakin rendah tingkat konsumsi seseorang berarti semakin miskin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Damayanti (2018) yang pada kesimpulannya menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, penelitian Noviansyah, Rosyadi dan Yacoub

(2019) juga menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga memberikan pengaruh signifikan positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika

Berdasarkan hasil analisis dengan uji t, diketahui bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM Kabupaten Mimika. Adanya pengaruh negatif dan tidak signifikan ini dikarenakan peningkatan atau penurunan Pengeluaran Pemerintah memberikan *multiplier effect* yang negatif terhadap IPM Kabupaten Mimika.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah yang negatif dan tidak signifikan terhadap IPM Kabupaten Mimika di-sebabkan karena adanya disparitas pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan yang cukup besar, jika dibandingkan dengan pengeluaran pada sektor lain. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan juga masih belum terfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tetapi lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Sehingga hal ini kurang memberikan pengaruh secara langsung terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia Kabupaten Mimika.

Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh, besarnya Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Mimika untuk pendidikan dan kesehatan belum sesuai dengan amanat undang-undang, dimana pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja pendidikan minimal 20 persen dan untuk belanja kesehatan minimal 10 persen dari APBD.

Adanya disparitas dan ketidaksesuaian alokasi belanja pendidikan dan kesehatan berdasarkan tuntutan undang-undang ini menyebabkan Pengeluaran Pemerintah belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap IPM Kabupaten Mimika.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviansyah, Rosyadi dan Yacoub (2019) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

PENUTUP **Kesimpulan**

Dari hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yang diproksi dari pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan, berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika.

2. Pengeluaran Pemerintah, yang diproksi dari pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan, tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika.
3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika.

Saran

Merujuk pada kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran sebagai rekomendasi hasil penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah hendaknya dapat menggerakkan sektor-sektor produktif, meningkatkan lapangan pekerjaan, menciptakan iklim usaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga akan berimbas pada peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya akan terus meningkatkan IPM Kabupaten Mimika.
2. Dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah, hendaknya Pemerintah Kabupaten Mimika konsisten menjalankan amanat undang-undang terkait alokasi pengeluaran pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga ketersediaan dana tersebut dapat digunakan untuk memperluas akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu, Pemerintah

Kabupaten Mimika, melalui OPD terkait, juga perlu memastikan keberadaan tenaga pendidik dan kesehatan di lokasi kerjanya untuk melayani masyarakat.

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- , 2008. *Ekonomi Archipelago*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alfian D, Muh. 2016. "Analisis Perbandingan Pola Konsumsi Pangan dan Non Pangan Rumah Tangga Kaya dan Miskin di Kota Makassar". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- , 2005. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Azizah, Nur, I. T. A Rievane dan S. Suhab.2016. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Kabupaten Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Bakar, Abu. 2018. "Analisis Determinan Kemiskinan di Kabupaten Mimika". Laporan Hasil Penelitian Dosen, STIE Jambatan Bulan.
- BPS Kabupaten Mimika. 2017. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mimika Menurut Pengeluaran 2013-2017.
- , 2018. *Mimika Dalam Angka (Mimika Regency in Figures) 2018*.
- , 2019. *Mimika Dalam Angka (Mimika Regency in Figures) 2019*.
- BPS Provinsi Papua.2018. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Papua 2010-2018.
- BPS Republik Indonesia. 2014. Indeks Pembangunan Manusia 2014.
- Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.2019. Laporan Realisasi Anggaran.
- Bastias, Desi Dewi. 2010. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Atas Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan

- Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009". Skripsi Universitas Diponegoro.*
- Damayanti, Siska. 2018. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Dan Rasio Ketergantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia". Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Irawan dan Suparmoko. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Jhingan, M. L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PTRaja Grafindo Persada.
- Kacaribu, Rosinta Dewi. 2013. "Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Provinsi Papua". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Kusumawardani, Rivayani. 2018. "Analisis Pengeluaran Rumah Tangga Untuk Pendidikan di Provinsi Jawa Timur". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya.
- Lilik, Rahmawati. 2008. "Kebijakan Fiskal dalam Islam". Jurnal Al-Qanun, Vol. 11, No. 2, hal. 429-452
- Lonska, Jelena dan Vera Boronenko. 2015. *Rethinking Competitiveness and Human Development in Global Comparative Researches*. Journal of Economic and Finance, 23, hlm. 1030-1036
- Mangkoesoebroto, Guritno.2012. *Ekonomi Publik*, Edisi III. Yogyakarta: BPFE.
- Mankiw, N. G. 2006. *Teori Makro Ekonomi*, Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Edisi Pertama. Mataram: Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Ndakularak, Erwin, N. D. Setiawina, dan I. K Djayastra. "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/kota di Provinsi Bali". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Volume III (3), hal. 140 – 153.
- Nikijuluw, J. B. 2013. "Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku". Jurnal Ekonomi Cita Ekonomika Volume VII (2), hal. 196 – 203.
- Noviansyah, Helmi, Rosyadi dan Yarlina Yacoub. 2019. "Kemampuan Konsumsi

- Rumah Tangga, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Dalam Menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat".* Jurnal Ekonomi Daerah Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Prasetyo, Ahmad Danu dan Ubaidillah Zuhdi.2013. "The Government Expenditure Efficiency towards the Human Development". Journals of Economics and Finance, 5, hlm. 615- 622,
- Rahmat. 2013. *Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Penerbit Baduose Media.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan, Cetakan Ketiga*. Jakarta: PenerbitKencana.
- 2003. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Subandi. 2012. *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Syalkahfi, M. Alyuriza. 2016. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Lampung Tahun 1994 – 2014". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia Teori dan Penemuan Empiris*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro, M, P dan S. C Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Usmaliadanti, Christina. 2011. "Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009". Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.

- Utama,Made Suryana, Ida Bagus Purbadharma. 2014. "Pengaruh Pertumbuhan Investasi, Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali". E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.2014, hal 330-344.
- Utami, Jana Putri. 2017. *Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Rumah Tangga di Kota Medan dan Faktor Yang Mempengaruhinya*. Tesis Program Studi Magister Bisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Widodo, Adi, Waridin, dan Johana Maria K. 2011. "Analisis Pengaruh Pengeluaran di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah". Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Juli 2011, Vol I (1). Hal. 25-42.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Zakaria, Junaiddin. 2015. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Makassar: PT Umitoha Ukhuwa

